

Abstrak

Pertanyaan penelitian dalam tesis ini adalah bagaimana strategi yang dilakukan oleh sebuah gerakan sosial kelompok minoritas transgender (Waria) di Yogyakarta studi kasus Iwayo dalam melakukan klaim atas keadilan sosial.

Ada setidaknya tiga temuan besar dalam kajian ini. Pertama, ada dua pendekatan atau strategi yang digunakan oleh gerakan Ikatan Waria Yogyakarta (Iwayo) yakni politik identitas dan politik kelas dan masing-masing memiliki relevansi sesuai konteks persoalan yang dihadapi oleh Iwayo. Pemilihan strategi gerakan tersebut dipengaruhi oleh beberapa berikut ini: (a) Nalar berpikir dalam memahami akar diskriminasi yakni antara faktor penindasan sistem, atau faktor tidak diakuiinya identitas gender mereka; (b) Proses pembentukan aliansi dan identifikasi siapa kawan dan siapa lawan; dan (c) Faktor kepemimpinan internal organisasi.

Kedua, pilihan atas strategi yang dilakukan memiliki kaitan yang erat dengan watak dari gerakan ini sebagai sekelompok minoritas yang mengalami, apa yang penulis labeli sebagai triple minority – dari sisi gender, seksualitas, maupun ekonomi. Dari sisi gender, mereka bukan laki-laki atau perempuan secara mainstream. Dari sisi seksualitas, mereka tidak merasa nyaman dan diterima dengan seksualitas yang mereka miliki. Dari sisi ekonomi, mereka adalah kelompok miskin. Kompleksitas posisi mereka sebagai minoritas “pangkat tiga” ini menghasilkan kedalaman masalah identitas yang juga “pangkat tiga”, yang dihadapi oleh gerakan ini.

Ketiga, kompleksitas identitas yang dialami ini berhadapan dengan kondisi gerakan yang juga ‘chaotic’, serba tidak menentu selama 4 dekade ini. Dalam ketidakmenentuan ini, Iwayo tetap berupaya untuk melakukan politik klaim atas hak-hak mereka meskipun harus melakukan banyak kompromi dan pembacaan situasi mengingat posisi mereka yang sangat rentan jika dihadapkan dengan norma dan identitas mereka di mata masyarakat yang bercorak heteronormatif.

Kompleksitas identitas ini yang menyebabkan perjuangan kelompok minoritas seksual tidak memadai bila dikerangkai hanya dalam isu politik identitas belaka. Kecenderungan mengkerangkai dalam skema politik identitas ini, tidak terlepas dari tren global khususnya kampanye yang dilakukan oleh lembaga donor maupun NGO Internasional terkait isu hak-hak seksual sebagai bagian dari gambaran besar skema Hak Asasi Manusia (HAM).

Abstract

This thesis examine about the strategy transformation of waria movement in Yogyakarta which moving between the pendulum of politics of redistribution and politics of recognition for social justice. There is an important context which set the situation of clash between increasing advocacy on sexuality rights globally versus managing risk/ dangers on sexuality in development in Indonesia. The resesearch shows that *Ikatan Waria Yogyakarta (Iwayo)* have two major roles: *first*, creates a space for an alternative narrative against the major forces; *second*, they do 'vernacularization' on the universal human rights into their locality. *Iwayo* are the place where the *waria* can associate and express their gender identity. They alsoarticulate the interests of *waria* trough social campaigns, cultural and art performances, social activities as well as lobbying and public hearings to the local parliament. The main issue that they have brought is that in citizenship forms, sex (or gender) is shown as a rigid bivariate category and there is a fact that *waria* cannot access the national identity card which lists them as citizens.

Their role is important since they have been trying to create narratives outside of the three major forces: (1) State who sees this as disease and has to be cured; (2) International donors who speaking about HIV and AIDS risks; and (3) Local NGO who speak for transgender on sexual rights. Despite the fact that *Iwayo* has been trying to create an alternative space and do vernacularisation, they are also influenced by and dependent on the other three major forces. In reality they also need aid support from donor trough HIV&AIDS issue. However, *waria* as the citizens of Indonesia have sexual and citizenship rights that need to be protected.